

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, keluarga dan masyarakat. Masyarakat adalah *stakeholder* pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah. Mereka adalah pembayar dan pelanggan pendidikan, baik melalui pembiayaan langsung dalam kegiatan sekolah maupun pajak, sehingga sekolah seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat.

Fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (UUSPN No.20, tahun 2003:8). Menurut Sergiovani dan Starrat dalam Sagala (2006: 58), tujuan persekolahan adalah menjamin kompetensi minimal dalam keterampilan dan pemahaman yang telah ditentukan bagi semua anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada sejumlah faktor penentu kinerja sekolah.

Konsep sekolah bermutu berangkat dari proses manajemen yang mendesain sedemikian rupa konsistensi visi dengan misi, dan juga konsekuensi tujuan dengan target yang diimplementasikan dengan program kerja, dengan mengakomodasi keinginan dan mengacu pada ukuran kualitas

yang sudah ditentukan. Formulasi sekolah bermutu menggambarkan ukuran kualitas dari semua indikator yang menggambarkan substansi, yaitu kualitas seperti apa yang mungkin didapatkan oleh sekolah yang bersangkutan dengan manajemen dan potensi internal maupun eksternal yang mengitari sekolah tersebut. Sekolah dapat dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: 1) prestasi akademik; yaitu nilai rapor dan nilai kelulusan yang memenuhi standar; 2) memiliki nilai-nilai kejujuran, ketakwaan, kesopanan, dan mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya; 3) memiliki tanggungjawab yang tinggi dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan sesuai dengan dasar ilmu yang diterima di sekolah. Untuk memenuhi harapan mutu pendidikan yang tinggi, tentu diperlukan desentralisasi fungsi-fungsi manajemen di sekolah untuk mengoptimalkan kebijakan pada tingkat manajemen sekolah dalam melaksanakan programnya, terkait dengan hal tersebut menunjukkan bahwa peranan antara para profesional, orang tua, dan masyarakat saling melengkapi memenuhi kualitas sekolah.

Menurut Sergiovani dan Starrat dalam Sagala (2006: 58), keberhasilan kinerja sekolah dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu: 1) Manajemen kurikulum yang lugas dan fleksibel berpedoman pada standar nasional pendidikan; 2) proses belajar mengajar (PBM) yang efektif dengan mengedepankan fungsi pelayanan belajar untuk memperoleh mutu yang baik; 3) lingkungan sekolah yang sehat terdiri dari lingkungan fisik dan kerja sama yang kondusif; 4) Sumber daya manusia (SDM) dan sumber

daya lain yang andal yaitu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan mengacu pada profesionalisme; 5) standarisasi pengajaran dan evaluasi hasil belajar yang terukur; dan 6) dukungan masyarakat.

Dalam UUSPN No.20 Tahun 2003:35 mengemukakan, pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan peran orang tua yang tergabung dalam komite sekolah menjadi penting dan sesuai dengan prinsip kemandirian dalam manajemen berbasis sekolah. Prinsip kemandirian dalam manajemen berbasis sekolah adalah kemandirian dalam nuansa kebersamaan, dan hal ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang disebut sebagai *total quality management*, melalui suatu mekanisme yang dikenal dengan konsepsi *total football* dengan menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan, yaitu peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan pengembangan masyarakat. Dana dan fasilitas merupakan salah satu faktor yang ikut mendukung dan menunjang kegiatan belajar mengajar, bahkan menentukan keberhasilan pendidikan. Sampai sejauh mana peran dan fungsi komite sekolah dalam pengelolaan anggaran dengan memobilisasi dana pendidikan dan memobilisasi bantuan fasilitas pendidikan.

Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun

di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.

Kepmendiknas tersebut menyebutkan bahwa peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah (1) sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), (2) *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), dan (4) mediator atau penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Dalam menjalankan perannya, komite sekolah memiliki 7 fungsi. (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (2) melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (3) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, (4) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dalam hal kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan, (5) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, (6) menggalang dana

masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya maka paradigma manajemen berbasis sekolah mengadung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan bersama.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan fenomena peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan, sejauhmana komite sekolah telah melaksanakan peran dan fungsinya dalam mendukung pengelolaan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Demak.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peran komite sekolah dalam pengelolaan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Demak,?”

Berdasarkan dari fokus penelitian tersebut maka dapat dirumuskan empat sub fokus penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan dalam pengelolaan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Demak?
2. Bagaimana peran Komite Sekolah sebagai badan pendukung dalam pengelolaan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Demak?
3. Bagaimana peran Komite Sekolah sebagai badan pengontrol dalam pengelolaan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Demak ?
4. Bagaimana peran Komite Sekolah sebagai badan penghubung dalam pengelolaan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada empat, yaitu:

1. Memperoleh informasi tentang peran Komite Sekolah sebagai badan pendukung dalam pengelolaan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Demak.
2. Memperoleh informasi tentang peran Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan dalam pengelolaan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Demak.
3. Memperoleh informasi tentang peran Komite Sekolah sebagai badan pengontrol dalam pengelolaan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Demak.

4. Memperoleh informasi tentang peran Komite Sekolah sebagai badan penghubung dalam pengelolaan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Demak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

1. Manfaat praktis
  - a. Merupakan masukan bagi Komite Sekolah dan Kepala Sekolah dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pengelolaan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Demak.
  - b. Sebagai informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* tentang keberadaan Komite Sekolah, serta peran dan fungsinya dalam menunjang pengelolaan mutu pendidikan.
  - c. Sebagai bahan pertimbangan untuk pemantauan, perbaikan program, perencanaan dan prediksi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Demak, agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Komite Sekolah di satuan-satuan pendidikan.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai hasil penelitian yang dapat memberikan kontribusi konsep guna mengembangkan peran dan fungsi Komite Sekolah dalam pengelolaan mutu pendidikan pada satuan pendidikan di Kabupaten Demak.

- b. Sebagai acuan bagi peneliti lain dalam mengkaji masalah Komite Sekolah dari sudut pandang yang berbeda.

## **E. Daftar Istilah**

Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (UUSPN No.20 tahun 2003:7).

Pengelolaan/manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Manajemen pendidikan pada hakekatnya menyangkut tujuan pendidikan, manusia yang melakukan kerjasama, proses sistemik dan sistematis, serta sumber-sumber yang didayagunakan (Engkoswara dalam Mulyasa, 2004:8)

Mutu adalah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan (Arcaro, 2005:75). Mutu didasarkan pada akal sehat, seperti diungkapkan oleh Daming yang mendasarkan pada kebutuhan untuk memperbaiki kondisi kerja bagi setiap pegawai. Fokus mutu didasari oleh upaya positif yang dilakukan individu.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No.20 tahun 2003).

Pendidikan yang bermutu adalah suatu evaluasi proses mendidik yang memenuhi kebutuhan untuk mencapai dan mengembangkan bakat pelanggan dengan standar, dan pada waktu yang sama dipertanggungjawabkan kepada pelanggan yang telah membayar proses atau keluaran dari hasil proses pendidikan tersebut. Menurut Anonim (2000:7-8), mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.